



## UPAYA MEMULIHKAN HAK-HAK PEREMPUAN: FIAP KANADA DALAM UPAYA PENURUNAN *GENDER-BASED VIOLENCE* DI AFGHANISTAN

**Kanya Sepasthika Ramadhani, Marten Hanura**

Departemen Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Diponegoro

Jalan Prof. H. Soedarto, SH., Tembalang, Kota Semarang

Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Canada as a country highly committed to promoting gender equality and women's empowerment, launched the Feminist International Assistance Policy (FIAP) in 2017 under the leadership of Prime Minister Justin Trudeau. The Feminist International Assistance Policy (FIAP) is a feminist-based foreign policy that focuses on gender equality and women's empowerment. In this case, FIAP's foreign policy is considered to be the best solution for Canada to overcome existing poverty and inequality. Afghanistan is one of the target countries for receiving Canadian FIAP assistance. Given the high percentage of Gender-Based Violence (GBV) phenomena and discrimination in Afghanistan, Canada is also trying to help reduce the level of GBV and discrimination in Afghanistan through the FIAP policy program. With this the author is interested in identifying various forms of cooperation carried out by Canada and Afghanistan in efforts to combat gender-based violence in Afghanistan, as well as explaining how a feminist perspective views Canadian FIAP policies. The scope of this research is during the period of Prime Minister Justin Trudeau's government from 2018 to 2020. This research uses qualitative methods to explain how feminist-based foreign policies can affect the level of reduction of gender-based violence, and uses congruent methods as an analytical technique. The theory of liberal feminism, Gender-Based Violence, the concept of Gender Equality, Gender Mainstreaming, and Feminist Foreign Policy will be used in this research as a knife of analysis. The results of the study show that with the Feminist International Assistance Policy (FIAP) as a manifestation of liberal feminism, Canada will promote gender equality and empower women through various existing programs and policies so that it can have an impact on reducing the level of gender-based violence in Afghanistan.*

**Keywords:** *Feminist International Assistance policy (FIAP), Gender-Based Violence (GBV), Feminist foreign policy, Canada, Afghanistan.*

### **PENDAHULUAN**

Diskriminasi perempuan di Afghanistan telah terjadi jauh sebelum Taliban mengambil alih kekuasaan pemerintahan Afghanistan pada tahun 1996. Hal ini dikarenakan diskriminasi terhadap perempuan berakar dari adat istiadat di Afghanistan. Salah satu budaya yang paling banyak berpengaruh ialah budaya suku Pashtun yang merupakan suku mayoritas di Afghanistan (Nehan and Cox, 2022). Taliban sendiri merupakan kelompok yang mayoritas anggotanya berasal dari Pashtun. Mereka berambisi mendirikan negara berlandaskan syariat Islam. Sehingga, sejak tahun 1996 hingga 2001, kebijakan-kebijakan yang diterapkan Taliban adalah hukum syariah Islam yang kental dengan campuran budaya Pashtun. Kondisi ini juga diperparah dengan konflik perang sipil selama 20 tahun terakhir semenjak invasi Amerika Serikat ke Afghanistan pada tahun 2001 (Maizland, 2021). Pada akhirnya kebijakan ini menciptakan masyarakat yang termarginalisasi dan berujung pada pembatasan perempuan dalam memperoleh hak-haknya.

Perjuangan untuk memulihkan hak-hak perempuan di Afghanistan sudah dimulai sejak abad ke-19. Namun, ketidakstabilan politik membuat setiap kemajuan selalu diikuti oleh kemunduran. Sejak kehadiran Taliban di Afghanistan, kebebasan kaum perempuan dalam era modern mengalami kemunduran yang lebih jauh. Sebelum kehadiran Taliban, perempuan dari kalangan atas dan bagi mereka yang hidup di wilayah urban masih bebas mengenyam pendidikan setinggi mungkin, mendapatkan pekerjaan, hingga mendapatkan hak politik. Namun, setelah kehadiran Taliban, seluruh perempuan Afghanistan bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah sendirian tanpa didampingi laki-laki. Sebanyak 87% perempuan Afghanistan juga mengalami setidaknya salah satu bentuk diskriminasi gender yang dikategorikan ke dalam *gender-based violence* (GBV) selama hidupnya (UN Women, no date).

Hingga saat ini, Afghanistan di bawah pemerintahan Republik Islam Afghanistan masih terus berjuang untuk mendapatkan perdamaian di negaranya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah demokratis Afghanistan adalah berusaha mengembalikan hak-hak perempuan. Pemerintah Republik Islam Afghanistan percaya dengan mendorong peran dan mengembalikan hak-hak perempuan dapat membantu terjadinya proses perdamaian. Maka dari itu, Afghanistan meratifikasi *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) pada tahun 2003 (Barr, 2013). Meskipun telah meratifikasi CEDAW, pemerintah Afghanistan masih mengalami kesulitan dalam pelaksanaan dan impelentasinya.

Afghanistan memang telah terlepas dari pengaruh kekuasaan Taliban sejak tahun 2001 hingga 2021. Namun, kaum perempuan Afghanistan masih belum mengalami kemajuan sepenuhnya. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh *Amnesty Internasional* sebanyak 87% perempuan Afghanistan buta huruf, 70-80% perempuan Afghanistan mengalami pernikahan paksa, dan sebagian besar sudah menikah sebelum berusia 16 tahun (Amnesty International, 2011). Keterbatasan bagi perempuan untuk mendapatkan akses menuju kesehatan, ekonomi, dan pendidikan yang dapat menunjang mereka untuk hidup mandiri menyebabkan perempuan Afghanistan sangat bergantung pada laki-laki. Bahkan pada tahun 2011, Afghanistan mendapatkan predikat sebagai "*The Worst Places in the World for Women*" (Boone, 2011).

Afghanistan melakukan kerjasama dan mendapatkan bantuan dari berbagai negara serta organisasi internasional untuk mendorong kesetaraan gender di negaranya. Salah satu negara tersebut adalah Kanada. Keputusan Kanada untuk terlibat di Afghanistan dilatarbelakangi oleh adanya serangan teroris di Amerika Serikat pada 11 September 2001. Kanada terlibat dalam operasi militer bersama NATO untuk membantu mengamankan, membangun kembali, dan mengarahkan Afghanistan untuk menjadi negara yang lebih stabil, juga untuk memberantas jaringan terorisme yang bersarang di sana (Government of Canada, 2012).

Kemudian, sejak terpilihnya Perdana Menteri Justin Trudeau pada tahun 2015, Kanada di bawah pemerintahan Justin Trudeau mengumumkan peluncuran kebijakan luar negeri baru yang mengangkat nilai-nilai feminisme dan entitas gender di dalamnya, yakni *Feminist International Assistance Policy* (FIAP). Melalui FIAP, Kanada berupaya sedemikian rupa merumuskan bantuan luar negerinya agar sesuai dengan kebutuhan paling mendasar para perempuan di masing-masing negara sasaran. Kanada turut berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas bantuan internasional terutama dalam kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan.

Penelitian mengenai kebijakan luar negeri Kanada berbasis gender dan feminisme yakni FIAP belum banyak dilakukan. Wulandari (2020) dalam tulisan

berjudul “*Peran United Nations Entity on Gender Equality and The Empowerment of Women (UN WOMEN) dalam Kebijakan Luar Negeri Berbasis Gender di Kanada (2015-2019)*” menjelaskan bagaimana Kanada di bawah pemerintahan Perdana Menteri Justin Trudeau berupaya untuk mendorong keterwakilan dan peran perempuan Kanada melalui implementasi kebijakan luar negeri yang berlandaskan feminisme. Sedangkan, Tiessen (2015) dalam karya berjudul “*Gender Essentialism in Canadian Foreign Aid Commitments to Women, Peace, and Security*” mengkritisi komitmen Kanada untuk mempromosikan kesetaraan gender dalam program bantuan luar negeri pada masa Perdana Menteri Stephen Harper. Tiessen berpendapat Kanada gagal memberdayakan perempuan sebagai agen perdamaian (Tiessen, 2015). Selanjutnya, Chapnick (2019) dalam “*The origin of Canada Feminist Foreign Policy*” memberikan penjelasan mengenai asal usul label “feminisme” dalam kebijakan luar negeri Kanada yang baru, dan seberapa penting peran Justin Trudeau dalam perubahan kebijakan luar negeri Kanada tersebut.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan, belum ada penelitian yang secara spesifik membahas mengenai upaya Kanada membantu negara-negara konflik dalam mengurangi GBV melalui FIAP dengan jangkauan penelitian dari tahun 2018 hingga 2020. Sehingga, penulis tertarik untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya dengan mengkaji lebih dalam kerjasama antara Kanada dan Afghanistan untuk mengurangi GBV sebagai bentuk komitmen dan implementasi kebijakan luar negeri Kanada melalui kacamata feminisme.

Penulis berargumen bahwa Kanada percaya dengan memasukan entitas gender dan feminisme ke dalam kebijakan luar negerinya merupakan salah satu cara terbaik untuk menciptakan dunia yang inklusif, damai, dan bebas dari kemiskinan. Melalui kebijakan *Feminist International Assistance Policy*, Kanada secara eksplisit menunjukkan dukungannya terhadap kesetaraan gender melalui upayanya menekan tingkat kekerasan berbasis gender yang masih marak terjadi di negara-negara konflik seperti Afghanistan. Kanada mencoba menyokong pemberdayaan perempuan dan anak sebagai salah satu cara melanggengkan perdamaian di Afghanistan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Secara khusus, analisis dan interpretasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik kongruen. Metode analisis ini mencoba membuktikan bahwa peneliti mampu memprediksi hasil dari suatu kasus secara teori (George and Bennet, 2005). Dengan metode kongruen, Penulis mencoba mencari kecocokan antara kerangka teori dalam penelitian dan data-data yang telah dikumpulkan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber-sumber primer dan sekunder.

Penulis juga menggunakan Teori Feminisme Liberal dan Konsep *Gender-Based Violence* (GBV) sebagai pisau analisis dalam penelitian ini. Teori Feminisme Liberal berasumsi adanya kesenjangan antara kaum laki-laki dan perempuan disebabkan oleh batasan adat dan sistem hukum yang tidak berpihak pada kaum perempuan. Dengan ini mereformasi sistem hukum merupakan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Feminisme Liberal juga memandang dunia hubungan internasional sebagai dunia yang penuh dengan dominasi laki-laki. Kaum feminisme liberal beranggapan bahwa dalam perlakuannya, negara berperilaku tidak adil dan cenderung tidak memihak kaum perempuan. Cynthia Enloe dalam bukunya *Bananas, Beaches, and Base: Making Feminist Sense of International*

*Politics* tahun 1989 beranggapan bahwa politik internasional seringkali tidak melibatkan pandangan feminisme, sebab politik internasional memfokuskan diri pada kekuasaan dimana perempuan secara alamiah tidak mampu untuk memahami konsep-konsep politik seperti kekuasaan. Jika ingin membuat politik internasional masuk akal, maka argumen “*international is personal*” harus diwujudkan dengan membuat perempuan terlihat dan tidak dikesampingkan lagi dalam urusan politik yang selama ini merupakan ranah maskulin. Lebih lanjut lagi, konsep *Gender-Based Violence* (GBV) digunakan dalam menjelaskan tindakan penindasan yang dilakukan kaum laki-laki terhadap kaum perempuan di Afghanistan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap HAM. UNHCR sendiri mendefinisikan GBV sebagai setiap tindakan berbahaya atau merugikan yang dilakukan kepada suatu individu tertentu berdasarkan gender, ekspresi gender, identitas gender, maupun persepsi gender mereka (UNHCR, no date).

## **PEMBAHASAN**

### **Gender dalam Kebijakan Luar Negeri Kanada**

Selama beberapa dekade terakhir, Kanada adalah salah satu negara yang menjadi garda terdepan dalam promosi feminisme dan kesetaraan gender di panggung internasional. Negara ini memiliki beberapa konstitusi berbasis gender seperti *Canadian Human Rights Act* (CHRA) dan *Canadian Charter of Rights and Freedoms*. CHRA dirancang untuk memastikan adanya kesetaraan dalam kesempatan dan melindungi masyarakat Kanada dari perilaku diskriminasi yang didasarkan pada ras, etnis, warna kulit, agama, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, identitas atau ekspresi gender, status perkawinan, status keluarga, karakteristik genetik, disabilitas, dan beberapa kategori lainnya (Kirkup, 2018). Sementara itu, *Canadian Charter of Rights and Freedoms* atau *The Charter* adalah bagian dari konstitusi Kanada yang memberikan perlindungan hak bagi setiap warga negara Kanada untuk diperlakukan secara sama di mata hukum. Pierre Trudeau, Perdana Menteri Kanada yang menjabat saat pengesahan piagam *The Charter*, menyebutkan bahwa “*Canada is a society where all people are equal and where they share some fundamental values based upon freedom. The search for this Canadian identity, as much as my philosophical views, had led me to insist on the charter.*” Piagam tersebut merupakan bentuk implementasi dari pandangan filosofis masyarakat Kanada mengenai nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan yang berada di tengah-tengah masyarakat Kanada.

Kanada juga menunjukkan dukungan dan komitmen untuk mempromosikan kesetaraan gender dan feminisme dalam agenda kebijakan luar negerinya. Hal ini didukung dengan tindakan Kanada yang meratifikasi *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW), yakni sebuah konvensi dasar bagi upaya global mengakhiri kekerasan terhadap perempuan. Kanada juga meratifikasi *Beijing Declaration and Platform for Action* dan dilanjutkan dengan komitmen Kanada untuk memberlakukan sistem *Gender Based Analysis* (GBA) dalam pemerintahannya.

Beberapa bentuk upaya aktif Kanada dalam pengembangan kebijakan tentang kesetaraan gender ialah dibentuknya *Canadian International Development Agency* (CIDA) tentang kesetaraan gender pada tahun 1999 dan pembentukan kebijakan Rencana Aksi tentang kesetaraan gender pada tahun 2010-2013. CIDA merupakan organisasi di bawah pemerintah federal Kanada yang bertanggung jawab untuk mengelola program-program bantuan asing di negara berkembang dan negara terdampak konflik. CIDA sendiri telah mendukung kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dengan memasukkan perspektif feminis dan gender dalam

pelaksanaan agenda kebijakan luar negerinya sejak tahun 1999 (CIDA, 1999). Perkembangan selanjutnya dari komitmen CIDA ialah dengan diluncurkannya kebijakan *Social Development Priorities: A Framework for Action* di tahun 2000. Kebijakan tersebut menguatkan sumber daya melalui pendidikan dasar, kesehatan dan gizi, HIV/AIDS, dan perlindungan anak sebagai prioritas program. Keempat prioritas program saling terintegrasi ke dalam satu tema besar, yakni kesetaraan gender, sebagai tema lintas sektoral yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan program CIDA (CIDA, 2000).

Sebagai bentuk respon atas evaluasi program kerja CIDA dalam kesetaraan gender, dibentuklah rencana aksi mengenai kesetaraan gender di tahun 2010. Tujuan dari dibentuknya rencana aksi tersebut ialah untuk mengatasi kesenjangan implementasi kebijakan CIDA dan sebagai bentuk respon atas evaluasi implementasi kebijakan CIDA tentang kesetaraan gender. *Canada Action Plan on Gender Equality (2010-2013)* berupaya untuk memetakan tindakan dan langkah-langkah penerapan kebijakan tersebut dalam periode 2010-2013 (CIDA, 2010).

### **1. Gender dalam Kebijakan Luar Negeri Kanada Era Justin Trudeau**

Trudeau telah dikenal sebagai seorang elit politik feminis. Bahkan dalam beberapa kesempatan di muka publik, Trudeau dengan bangga mengklaim dirinya sebagai seorang feminis. Contohnya ketika Trudeau menghadiri Komisi ke-60 PBB tentang Status Perempuan. Trudeau dengan lantang menyatakan *"I'll keep saying that I am a feminist until it is met with a shrug"* (UN Women, 2016). Trudeau juga kembali menegaskan dirinya adalah seorang feminis ketika menjadi narasumber di forum *HeForShe* pada 2016. Dalam pidatonya, Trudeau menegaskan kembali *"I think that everybody should be in the business of improving opportunities for women and girls"* (HeForShe, 2016). Sesuai dengan tema kampanye yang bertajuk *"Youth Engagement"*, Trudeau yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pemuda, turut memberi dukungan dan motivasi kepada remaja untuk terus menjadi pemimpin dan agen perubahan dalam mencapai kesetaraan gender. Trudeau juga menuangkan pandangan feminisnya dalam rangka menyambut Hari Perempuan Internasional pada 11 Oktober 2017 dengan berpartisipasi menulis sebuah essay yang diterbitkan dengan judul *"Why I'm Raising My Kids to be Feminists"*. Artikel tersebut berisi kekhawatiran Trudeau mengenai bagaimana anak-anaknya akan menjalani kehidupan di dunia yang masih penuh dengan stigma dan maraknya perilaku diskriminasi terhadap perempuan. Oleh karenanya Trudeau berusaha membesarkan anak perempuan dan laki-lakinya untuk menjadi feminis. Dengan harapan bahwa suatu saat anak perempuannya dapat hidup di dunia yang mau mendengar dan mendukung opininya sebagai perempuan. Begitu pula dengan kedua anak laki-lakinya, Trudeau berharap anak-anaknya dapat tumbuh dengan nyaman menjadi diri mereka sendiri dan menjadi seorang feminis (Trudeau, 2017).

Sejak terpilih sebagai Perdana Menteri ke-23 Kanada pada 2015 lalu, Trudeau segera menarik perhatian dunia. Untuk pertama kalinya, Kanada membentuk kabinet dengan jumlah gender yang seimbang, yakni terdiri dari 15 perempuan dan 15 laki-laki dari total 30 menteri dengan berbagai latar belakang berbeda (Murphy, 2015). Hal ini menjadi salah satu terobosan Trudeau yang disambut hangat oleh masyarakat Kanada. Ia menyebutkan bahwa kabinet ini merupakan cerminan Kanada sebagai negara yang peduli pada kesetaraan gender.

**Gambar 1**  
**Kabinet Kesetaraan Gender Trudeau**



Sumber: *The Guardian*, 2015

Kanada di bawah pemerintahan Justin Trudeau meluncurkan kebijakan luar negeri baru yang mengangkat nilai-nilai feminisme dan entitas gender di dalamnya, yakni *Feminist International Assistance Policy* (FIAP) pada 2017 lalu (Global Affairs Canada, 2020a). Kanada telah menunjukkan komitmennya dalam penanganan isu HAM dan kesetaraan gender di tataran internasional. Kanada juga aktif bekerjasama dengan organisasi internasional maupun lokal untuk mempromosikan kesadaran di seluruh dunia tentang pentingnya nilai-nilai moral dan mendasar dari HAM. FIAP juga semakin menegaskan posisi Kanada sebagai negara yang progresif, akomodatif, dan terbuka dengan berbagai macam pandangan. Sehingga penggunaan dan pengarusutamaan gender dalam agenda kebijakan luar negeri yang masih belum terlalu umum diadopsi oleh negara lain, sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Kanada.

## **2. *Feminist International Assistance Policy* (FIAP)**

Peluncuran kebijakan luar negeri *Feminist International Assistance Policy* dilatar belakangi oleh penurunan signifikan angka kemiskinan di dunia selama beberapa dekade terakhir. Meskipun begitu, diketahui perempuan mendominasi presentase masyarakat miskin di dunia. Terlebih lagi, sekitar 70% penduduk miskin di dunia yang berusia 15 tahun ke atas tidak bersekolah atau hanya memiliki sedikit pendidikan dasar adalah perempuan (World Bank, 2021). Hal ini menjadikan perempuan dan anak-anak masuk ke dalam golongan masyarakat paling rentan di dunia.

Hal tersebut menghantarkan Kanada untuk menjadikan tujuan utama dari dibentuknya kebijakan FIAP sebagai upaya global dalam mengentaskan kemiskinan. Untuk mencapai hal ini, kita perlu terlebih dahulu menangani masalah ketidaksetaraan. Dengan memastikan keterlibatan perempuan dalam masyarakat dan mendorong mereka untuk dapat mencapai potensi penuh mereka yang sesungguhnya, dapat membantu mereka memperoleh mata pencaharian sendiri. Dengan mengakui dan memberi kesempatan pada perempuan untuk mengaktualisasikan diri, maka keseimbangan antara maskulin dan feminin akan tercipta secara alami (Rosyidin, 2020). Sehingga, Kanada berharap dengan membantu meningkatkan kesetaraan gender dapat berdampak pada

peningkatan kesejahteraan perempuan di seluruh dunia.

Berinvestasi pada perempuan dan anak-anak merupakan salah satu cara terbaik untuk mengentaskan kemiskinan dan ketidasetaraan yang masih mengakar. Ketidaksetaraan gender bukan sekedar masalah moral dan sosial, melainkan memiliki dampak signifikan terhadap masalah ekonomi dunia. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa mencapai kesetaraan gender dapat meningkatkan PDB global sebesar \$12 triliun dalam satu dekade (Woetzel *et al.*, 2015).

Pada dasarnya feminisme liberal memandang kondisi terasingkannya perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, tercermin dalam lingkungan bermasyarakat dan dalam hubungan internasional. Hal ini sejalan dengan pemikiran Cynthia Enloe dalam buku *Bananas, Beaches, and Base: Making Feminist Sense of International Politics* tahun 1989 yang menyatakan bahwa realita yang terjadi dalam politik internasional saat ini adalah pemisahan peran antar gender yang pada akhirnya menjadikan dunia politik internasional penuh dengan dominasi laki-laki. Sementara kaum perempuan terasingkan karena dianggap tidak dapat memahami konsep-konsep politik yang cenderung 'maskulin' seperti kekuasaan, perang, ekonomi, ekonomi dan militer (Enloe, 1989). Enloe berargumen "*international is personal*" dan "*personal is international*". Maksudnya adalah politik internasional tidak dapat dimaknai hanya sebagai suatu entitas maskulin yang mengutamakan peran laki-laki dan mengesampingkan peran perempuan. Oleh karena itu, kaum feminis liberal beranggapan perlu adanya pandangan feminisme dengan melibatkan perempuan dalam urusan politik yang selama ini dianggap sebagai ranah maskulin. Hal ini juga membuktikan bahwa munculnya FIAP ialah bentuk manifestasi dari feminisme liberal.

Kanada percaya bahwa dengan menggunakan pendekatan feminisme dalam agenda bantuan luar negerinya dapat memberikan perubahan signifikan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan dan ketidaketaraan global. Menteri Pembangunan Internasional dan *La Francophonie* Kanada, Marie-Claude Bibeau, dalam pidatonya menyampaikan bahwa melalui FIAP, Kanada percaya dengan memasukkan entitas gender dan feminisme ke dalam kebijakan luar negerinya merupakan salah satu cara terbaik untuk menciptakan dunia yang inklusif, damai, dan bebas dari kemiskinan (Global Affairs Canada, 2017). Perumusan kebijakan tersebut menggunakan pendekatan berbasis hak asasi manusia, yang turut memperhitungkan semua bentuk diskriminasi.

Kebijakan FIAP terdiri dari satu area kerja inti dan lima area kerja lainnya yang bersifat multidimensional dan saling mendukung satu sama lain. Area kerja inti dari FIAP adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Adapun beberapa area kerja lainnya yang menjadi fokus dalam kebijakan tersebut, antara lain mempromosikan martabat manusia, mendorong pembangunan menyeluruh, mempromosikan aksi lingkungan dan iklim, mendukung pemerintahan inklusif, serta membantu memperkuat perdamaian dan keamanan global. Hal ini sesuai dengan pendapat John Stuart Mill dan Harriet Taylor Mill, pemberian pendidikan yang merata tidaklah cukup. Untuk mencapai kesetaraan gender, perlu dilakukan pemberian dan dukungan dalam hak ekonomi, sosial, dan politik yang setara antara laki-laki dan perempuan. Pemberian hak-hak dan kesempatan yang setara tersebut akan membantu para perempuan untuk lebih merdeka dan berkontribusi bagi kehidupan ekonomi keluarga (Tong, 2009).

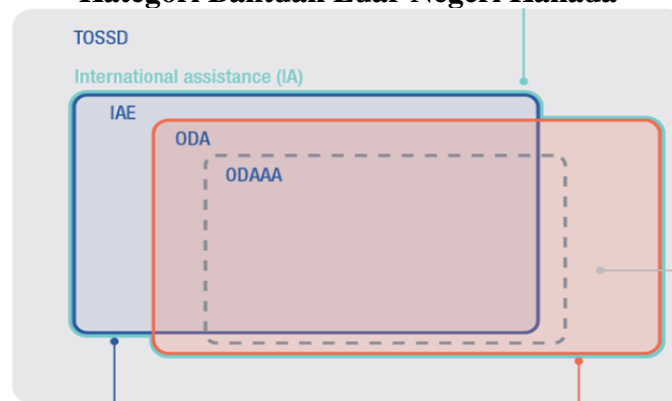
Di samping itu, FIAP juga berusaha membantu mengatasi tingginya tingkat *gender-based violence (GBV)* yang dialami perempuan. Hal ini termasuk kekerasan

dalam rumah tangga, perdagangan dan eksploitasi, pernikahan dini dan pernikahan paksa, serta *female genital mutilation/circumcision* (FGM/C). FIAP berupaya memperkuat organisasi dan aksi yang mendukung pemajuan hak-hak perempuan, peningkatan kapasitas pemerintah untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak perempuan dan untuk peningkatan analisis gender.

### Alur Distribusi Pendanaan FIAP Kanada untuk Afghanistan

Kanada membagi jenis-jenis bantuan luar negeri ke dalam beberapa kategori berbeda, yakni: *International Assistance Envelope* (IAE), *Official Development Assistance* (ODA), *Non-Official Development Assistance* (non-ODA), *Official Development Assistance Accountability Act* (ODAAA), dan *Total Official Support for Internasional Assistance* (TOSSD).

**Gambar 2**  
**Kategori Bantuan Luar Negeri Kanada**



Sumber: *Global Affairs Canada*, 2020

Berdasarkan gambar 3.1 mengenai kategori bantuan luar negeri Kanada, *International Assistance* (IA) mencakup seluruh sumber daya keuangan dan kegiatan yang disediakan oleh pemerintah Kanada untuk mendukung program pembangunan ekonomi, lingkungan, sosial, dan politik di negara lain, terutama negara berkembang. *International Assistance* (IA) turut mencakup *International Assistance Envelope* (IAE), *Official Development Assistance* (ODA), *Official Development Assistance Accountability Act* (ODAAA) di dalamnya (Global Affairs Canada, 2021).

Kebijakan luar negeri Kanada *FIAP* yang berada dibawah naungan Departemen Luar Negeri atau *Global Affairs Canada* secara spesifik termasuk ke dalam kategori bantuan pembangunan internasional atau *International Development*. Departemen ini menempati peringkat pertama yang paling banyak mendistribusikan dan menyalurkan bantuan luar negeri pada tahun 2019-2020. *Global Affairs Canada* mengelola berbagai jenis bantuan luar negeri yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan di dunia. Beberapa jenis bantuan tersebut antara lain: bantuan kemanusiaan, pembangunan internasional, serta bantuan keamanan dan stabilitas wilayah di negara terdampak konflik.

Mengingat FIAP merupakan sebuah kebijakan yang memiliki berbagai negara sasaran. Maka pencairan dana disalurkan secara bilateral kepada masing-masing negara sasaran. Tujuannya agar hasil yang dicapai dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara sasaran. Enam area aksi tersebut antara lain: kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan, mempromosikan martabat manusia, mendorong pembangunan menyeluruh, aksi lingkungan dan iklim, pemerintahan inklusif, dan memperkuat perdamaian dan keamanan global.



Afghanistan, sebagai salah satu negara sasaran FIAP, mendapatkan uluran bantuan pembangunan bilateralnya melalui *Afghanistan Reconstruction Trust Fund* (ARTF). ARTF merupakan sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 2002 untuk menyediakan mekanisme pembiayaan yang terkoordinasi untuk anggaran pemerintah Afghanistan. Sejak saat itu, ARTF telah menjadi salah satu sarana pendanaan utama Kanada dalam memberikan bantuan pembangunan di Afghanistan.

Pada tahun 2019-2020, Kanada menyumbang dana sebesar 65 juta dollar kepada ARTF. Bantuan pembangunan ini telah memiliki beberapa capaian dalam berbagai bidang seperti penurunan angka kematian ibu, peningkatan indikator kesehatan yang signifikan, dan khususnya peningkatan proporsi jumlah anak perempuan yang mendapatkan pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Kanada mengumumkan pendanaan sebesar \$135 juta selama tiga tahun pada *Afghanistan Pledging Conference 2020* di Jenewa. Sejak 2002 hingga akhir 2020, ARTF telah menjadi sumber pembiayaan tunggal terbesar untuk pembangunan Afghanistan. Sehingga, menghantarkan Afghanistan menjadi negara penerima bantuan terbesar Kanada pada akhir tahun 2020 (Global Affairs Canada, 2020b). Kanada telah menempati posisi sebagai pemberi donor bilateral terbesar ke-9 di Afghanistan secara keseluruhan. Diperkirakan jumlah total bantuan *Official Development Assistance* (ODA) Kanada ke Afghanistan antara tahun 2014-2018 mencapai \$16,6 miliar (Global Affairs Canada, 2020a). Sementara pada tahun 2019-2020, Afghanistan telah menerima bantuan bilateral sebesar \$169 juta dan bantuan multilateral sebesar \$20 juta (Global Affairs Canada, 2021).

### **Implementasi Program FIAP dalam Upaya Mengurangi GBV di Afghanistan**

Implementasi FIAP di Afghanistan memiliki fokus utama dalam bidang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan melalui promosi martabat manusia dan bidang perdamaian dan keamanan.

#### **1. Advokasi dan Dialog Kebijakan**

Kanada turut memainkan peran penting dalam bidang advokasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak di Afghanistan. Berbagai kegiatan advokasi yang dilakukan oleh Kanada antara lain, Kanada turut berkontribusi pada dialog kebijakan mengenai implementasi Rencana Aksi Nasional Afghanistan tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan pada tahun 2017-2018. Kanada mendukung Rencana Aksi Nasional Afghanistan mengenai Resolusi Dewan Keamanan PBB (UNSCR) 1325 (2015-2022) melalui program dialog kebijakan dan keterlibatan diplomatiknya. Rencana Aksi Nasional Afghanistan tersebut bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian dan sektor keamanan, serta untuk mengatasi masalah seputar perlindungan dan bantuan layanan rehabilitasi bagi perempuan. Kanada juga mendukung Rencana Aksi Nasional Afghanistan melalui program yang memajukan pemberdayaan sosial dan ekonomi perempuan, termasuk menangani GBV dan mendukung penerapan Hukum Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Global Affairs Canada, 2022a).

Kanada juga turut mendukung pengembangan kapasitas lembaga dan organisasi layanan sipil di Afghanistan. Salah satunya dilakukan dengan cara memberikan dukungan kepada *Afghanistan Independent Human Rights Commission* (AIHRC) dalam upaya peningkatan kapasitas promosi, perlindungan, dan pemantauan hak asasi manusia. Melalui program pembangunan bilateral tahun 2018, Kanada telah mendukung 17 organisasi hak-hak perempuan Afghanistan seperti *Afghan Women's Rights Organizations*, *Empowerment Centre for Women*, *Afghan Women's Council*,

*Afghanistan Women Educational Centre*, dan *Afghan Women Skills Development Centre*. Kanada aktif mendukung pelaksanaan dialog kebijakan dan juga pelaksanaan program di sektor hak dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Salah satu program di sektor ini pada tahun 2017 ialah proyek *Strengthening Afghanistan's Future through Empowerment Project* yang menghasilkan dana sebesar \$6 juta untuk tahun pelaksanaan 2017-2021. Program tersebut berfokus pada penyediaan layanan bantuan hukum bagi para korban penyintas kekerasan berbasis gender (GBV) dengan cara mewakili kasus mereka di pengadilan dan/atau menyelesaikannya melalui proses mediasi alternatif penyelesaian sengketa berbasis masyarakat (Global Affairs Canada, 2022a).

Kedutaan Kanada pun dinilai sebagai tempat yang aman untuk memfasilitasi diskusi mengenai perlindungan dan promosi hak-hak perempuan dan kesetaraan gender. Salah satunya adalah kegiatan diskusi meja bundar yang dilakukan setiap tiga bulan sekali mengenai hak-hak perempuan di Kabul. Selain itu, Kanada juga mendukung beberapa proyek lain yang berfokus pada pemberdayaan dan hak-hak perempuan melalui *Canada Fund for Local Initiatives (CFLI)*.

## **2. Promosi Martabat Manusia (Pendidikan, Kesehatan, Sosial, Budaya)**

Dengan terintegrasinya perspektif gender dalam keseluruhan program bantuan internasional Kanada, diharapkan bahwa program-program tersebut juga dapat beradaptasi dengan kebutuhan perempuan dan anak perempuan yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Afghanistan. Kanada banyak menggunakan pendekatan partisipatif untuk mempromosikan penerimaan dan integrasi gender kedalam situasi sosial budaya masyarakat Afghanistan karena rendahnya kesadaran masyarakat. Kanada melibatkan anggota masyarakat yang berpengaruh, dan beberapa perempuan Afghanistan dalam proses perencanaan berbagai program. Dilakukan juga sesi informasi bagi komunitas dan kelompok agama, termasuk pemuka agama, untuk meningkatkan kepedulian di tengah masyarakat.

Dalam sektor pendidikan, *The Education Quality Improvement Program (EQUIP)* muncul sebagai salah satu hasil investasi ARTF. EQUIP bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan akses menuju sekolah, dan peningkatan proporsi jumlah siswa perempuan dalam sekolah. Diskriminasi terhadap perempuan di Afghanistan sesuai dengan pendapat Wollstencraft yang berpendapat bahwa dengan memberikan hak pendidikan yang merata bagi laki-laki dan perempuan dapat menjadi solusi dari terciptanya kesenjangan gender di masyarakat (Wollstonecraft, 1975). Pendidikan yang layak bagi perempuan dan anak perempuan akan memungkinkan mereka untuk berkontribusi lebih jauh dalam kehidupan bermasyarakat karena lebih memahami hak-hak dan perlakuan yang layak mereka dapatkan. Melalui EQUIP, pemerintah Afghanistan juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki sarana dan prasarana, serta pemberian infrastruktur sekolah yang lebih baik bagi para guru dan murid (World Bank, 2018). Upaya ini juga telah memberikan kesempatan 8,9 juta anak untuk bersekolah formal di tahun 2020. Hampir 39% di antaranya adalah anak-anak perempuan. Selama periode 2019-2020, Kanada juga telah mendukung 3.372 anak yang putus sekolah untuk kembali menghadiri sekolah berbasis komunitas secara teratur. 65% di antara mereka adalah perempuan. Kanada juga membantu pelatihan dan penyediaan guru-guru, utamanya guru perempuan di daerah terpencil dan sulit dijangkau (Global Affairs Canada, 2022b).

Sementara dalam sektor kesehatan, ada program *The System Enhancement for Health Action in Transition (SEHAT)* yang bertujuan meningkatkan layanan kesehatan

dasar nasional di Afghanistan. Masih dengan pemberian fokus layanan bagi kesehatan perempuan, ibu, dan anak. Program ini turut memberi dukungan pada Kementerian Kesehatan Masyarakat Afghanistan dalam implementasi Strategi Sektor Kesehatan dan Gizi di Negara Tersebut. Program ini juga melaksanakan program pendidikan kebidanan dan keperawatan kesehatan bagi masyarakat. SEHAT berfokus untuk memberikan perawatan kesehatan reproduksi, ibu, bayi baru lahir, dan anak.

### **3. Sektor Perdamaian dan Keamanan**

Angka kesenjangan gender di Afghanistan masih sangat tinggi karena kekerasan yang banyak diterima oleh perempuan. Menurut feminisme liberal, adanya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan disebabkan oleh sistem hukum yang tidak berpihak pada kaum perempuan. Dengan ini mereformasi sistem hukum merupakan solusi yang ditawarkan untuk menciptakan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Maka dari itu, Kanada juga memberikan perhatian pada sektor keamanan dan perdamaian sebagai salah satu elemen penting penegak hukum.

Kanada turut memainkan peran penting dalam mengkoordinasi dukungan donor pada reformasi kepolisian. Salah satunya dengan cara posisi Kanada sebagai ketua dari *International Police Coordination Board* dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengadvokasi Unit Tanggap Keluarga agar meningkatkan jumlah polisi wanita dan pengadaan sumber daya yang memadai di seluruh negeri. Selain itu, Kanada juga turut mendukung perekrutan personel perempuan di dalam *Afghan National Defense and Security Forces* (ANDSF), serta pemberian observasi dari implementasi agenda Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan Afghanistan (Global Affairs Canada, 2020a). ANDSF memiliki target untuk perekrutan perempuan dalam Tentara Nasional Afghanistan adalah 0,75%, sementara untuk polisi sebanyak 5%. Dukungan Kanada ini membuat presentase polisi perempuan yang bertugas mengalami peningkatan dari 2% pada tahun 2016 menjadi 3% pada tahun 2017. Begitu pula dengan trend peningkatan perempuan pada rekrutmen Tentara Nasional Afghanistan. Presentase personel tentara perempuan telah mengalami peningkatan dari 0,53% pada tahun 2016 menjadi 0,6% pada tahun 2018 (Global Affairs Canada, 2022a).

Dalam sektor perdamaian dan keamanan, Kanada fokus pada peran vital polisi dalam menyediakan akses keadilan yang layak bagi perempuan dan menekankan bahwa cara terbaik untuk mencapai hal ini adalah dengan memastikan bahwa aparat polisi benar-benar memahami dan mencerminkan seluruh masyarakat yang mereka layani dan lindungi, termasuk perempuan. Kanada pun mempelopori pembentukan Kelompok Kerja Gender Dewan Koordinasi Polisi Internasional, yang diketuai bersama oleh Perwakilan Sipil Senior NATO dan Kementerian Dalam Negeri. Beberapa prioritas program tersebut adalah perekrutan personel perempuan, peningkatan kondisi layanan bagi perempuan di Kepolisian Nasional Afghanistan, dan meminimalisir adanya tindakan diskriminasi terhadap para personel perempuan di Kepolisian Nasional Afghanistan. Kelompok Kerja Gender juga turut memberikan rencana latihan jangka panjang bagi personel polisi perempuan Afghanistan, meningkatkan tingkat melek huruf bagi para perempuan di kepolisian, meningkatkan jumlah polisi perempuan di perbatasan Afghanistan, serta mengurangi hambatan perekrutan polisi perempuan.

Selanjutnya, pada April 2018, Kanada memberikan kontribusi keuangan untuk program Kota Polisi Wanita Tahap I untuk menyediakan perumahan yang aman di Kabul, bagi para polisi perempuan dan keluarga mereka. Kanada menyediakan 100% dana sebesar \$34,1 juta untuk tahap I melalui ARTF. Proyek ini diharapkan selesai pada

tahun 2020, termasuk pembangunan sepuluh gedung apartemen 30 unit yang dirancang untuk menampung 300 polisi perempuan nasional Afghanistan dan keluarga mereka (Global Affairs Canada, 2022a). Proyek ini juga dibuat sebagai bentuk dukungan dan perlindungan bagi aparat perempuan agar terhindar dari praktik diskriminasi yang masih sering dilakukan oleh aparat laki-laki terhadap perempuan, baik dalam kepolisian maupun tentara nasional.

Terakhir, Pemerintah Afghanistan dan Kanada juga turut menyampaikan pesan tersebut melalui seni. Sebanyak 140 warga Afghanistan yang terdiri dari berbagai kalangan baik anak-anak, polisi, pelajar, dan bahkan orang tua bekerjasama dengan para muralis dan seniman lainnya selama pengecatan 15 mural di empat provinsi berbeda di Afghanistan. Proyek lukisan mural ini diliput oleh enam saluran TV lokal dan stasiun radio di empat provinsi. Program ini mengusung tema proyek “*Promoting Peace, Security, and Equal Rights through Urban Art*” yang bertujuan untuk menyebarkan pesan pelibatan perempuan dalam perdamaian, polisi, dan pasukan keamanan. Program ini diimplementasikan dalam sebuah lukisan mural di beberapa provinsi Afghanistan yang menunjukkan wajah-wajah perempuan Afghanistan dengan pesan tertulis: “Kami adalah setengah dari Afghanistan”. Pesan ini diperkirakan dapat dilihat oleh ribuan warga Afghanistan tiap harinya.

Kanada juga turut memberikan pemberdayaan di bidang ekonomi melalui pelatihan wiraswasta dan agrikultural sehingga dapat membantu meningkatkan akses perempuan dalam ekonomi dan bisnis. Proyek ini diketahui juga meningkatkan akses perempuan Afghanistan untuk mendapatkan pekerjaan berbayar. Pelatihan dan program keterampilan yang diberikan Kanada terhadap perempuan Afghanistan tersebut dapat membantu mereka untuk lebih mandiri secara finansial, dan lepas dari ketergantungan ekonomi terhadap anggota keluarga laki-laki.

Sementara beberapa program kerja lainnya, seperti *Amplify Change: Supporting Women’s Rights* bertujuan untuk mewujudkan lingkungan yang mendukung dan melindungi hak-hak perempuan dan anak perempuan dengan meningkatkan kesadaran akan adanya hak-hak hukum, dan peningkatan akses perempuan ke layanan dan dukungan. Menimbulkan hasil meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan, hak waris perempuan, peningkatan akses menuju layanan hukum dan advokasi. Meningkatnya pemahaman mengenai hak-hak perempuan juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat kekerasan terhadap perempuan di sekitar mereka.

## **KESIMPULAN**

Sebagai negara yang progresif, akomodatif, dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM, Kanada berupaya untuk turut mengentaskan kemiskinan di dunia. Tingkat ketidaksetaraan gender yang tinggi, terutama di negara-negara rapuh dan terdampak konflik, menjadi salah satu penyebab ekstrimnya tingkat kemiskinan dunia. Melalui Menteri Pembangunan Internasional dan *La Francophonie*, Kanada percaya bahwa memasukkan entitas gender dan feminisme ke dalam kebijakan luar negerinya merupakan cara terbaik untuk menciptakan dunia yang inklusif, damai, dan bebas dari kemiskinan.

Melalui kebijakan luar negeri FIAP, Kanada telah berkontribusi untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam masyarakat dan mendorong perempuan untuk dapat mencapai potensi penuh. FIAP mengakomodasi hal tersebut melalui satu area kerja inti, yakni kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak perempuan. Kemudian, dibagi lagi ke dalam lima area kerja yang lebih spesifik, yaitu

mempromosikan martabat manusia, mendorong pembangunan menyeluruh, mempromosikan aksi lingkungan dan iklim, mendukung pemerintahan inklusif, dan membantu memperkuat perdamaian dan keamanan global.

Afghanistan menjadi salah satu negara sasaran implementasi FIAP. Kemiskinan ekstrem di Afghanistan adalah akibat dari pemerintahan yang rapuh dan maraknya praktik tradisional yang membatasi kontribusi perempuan dalam masyarakat. Kekerasan terhadap perempuan menjadi salah satu bentuk praktik tradisional yang paling sering terjadi. Berdasarkan hal tersebut, Kanada memfokuskan agenda bantuan luar negerinya dengan memberantas praktik-praktik *Gender-Based Violence* (GBV) di Afghanistan. Kanada melakukan advokasi, bekerjasama dengan berbagai organisasi yang memajukan hak-hak perempuan (pendidikan, kesehatan, ekonomi), dan melibatkan partisipasi perempuan di berbagai proses kebijakannya. Kanada, baik melalui kerjasama bilateral dengan pemerintah Afghanistan maupun melalui organisasi internasional dan organisasi lokal Afghanistan, bekerjasama untuk menyadarkan perempuan-perempuan di Afghanistan mengenai hak-hak yang layak mereka dapatkan serta memberdayakan mereka agar dapat mencapai potensi penuh mereka dengan memberikan berbagai bantuan melalui program-program dan pendanaan di bidang kesetaraan gender. Dengan begitu, kaum perempuan dapat berkontribusi lebih dalam kesejahteraan komunitas dan negara Afghanistan.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A. selaku dosen pembimbing satu, Bapak Marten Hanura, S.I.P., M.P.S. selaku dosen pembimbing dua dan Muhammad Faiq Adi Pratomo, S.I.P., M.Sc. selaku dosen penguji satu yang telah membimbing Penulis sehingga jurnal penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik.

## REFERENSI

- Amnesty International (2011) *The World's Worst Places To Be a Woman*, Amnesty International. Available at: <https://www.amnestyusa.org/the-worlds-worst-places-to-be-a-woman/> (Accessed: 7 June 2021). Afghan Women's Network (2009) *Gender - Based Violence in Afghanistan*. Kabul.
- Barr, H. (2013) *Afghanistan: Failing Commitments to Protect Women's Rights*, Human Rights Watch. Available at: <https://www.hrw.org/news/2013/07/11/afghanistan-failing-commitments-protect-womens-rights> (Accessed: 20 May 2021).
- Boone, J. (2011) *The Worst Places in the World for Women: Afghanistan*, *The Guardian*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2011/jun/14/worst-places-in-the-world-for-women-afghanistan> (Accessed: 23 June 2021).
- Chapnick, A. (2019) 'The Origins of Canada's Feminist Foreign Policy', *International Journal*, 74(2). doi: 10.1177/0020702019850827.
- CIDA (1999) *CIDA's Policy on Gender Equality*. Gatineau, Quebec. Available at: [http://www.sice.oas.org/genderandtrade/cida\\_gender-e\\_policies.pdf](http://www.sice.oas.org/genderandtrade/cida_gender-e_policies.pdf).
- CIDA (2000) *CIDA's Social Development Priorities: A Framework for Action*. Available at: <https://publications.gc.ca/site/eng/416713/publication.html>.
- CIDA (2010) *Gender Equality 2010–2013*. Gatineau, Quebec. Available at: <https://evaw-global-database.unwomen.org/en/countries/americas/canada/2010/gender-equality-action-plan-2010-2013>.

- Enloe, C. (1989) *Bananas, Beaches, and Base: Making Feminist Sense of International Politics*. Second Edi. London: University of California Press.
- Nehan, N. and Cox, M. (2022) 'The Rise and Fall of Women Rights in Afghanistan', *LSE Public Policy Review*, 2(3), pp. 1–10. doi: 10.31389/lseppr.59.
- George, A. L. and Bennet, A. (2005) 'The Congruence Method', in *Case Studies and Theory Development in the Social Science*. Cambridge: MIT Press.
- Global Affairs Canada (2017) *Canada's Feminist International Assistance Policy*. Ottawa. Available at: [https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf?\\_ga=2.99349854.1391411961.1619158415-950508640.1608195857](https://www.international.gc.ca/world-monde/assets/pdfs/iap2-eng.pdf?_ga=2.99349854.1391411961.1619158415-950508640.1608195857).
- Global Affairs Canada (2020a) *Evaluation of International Assistance Programming in Afghanistan, 2014/15 to 2019/20*, International Assistance Evaluation Division. Available at: <https://www.international.gc.ca/gac-amc/publications/evaluation/2020/afghanistan-ia-ai.aspx?lang=eng>.
- Global Affairs Canada (2022b) *Report to Parliament on the Government of Canada's Official Development Assistance 2019-2020*. Ottawa. Available at: [https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/international-assistance-report-rapport-aide-internationale/2019-2020.aspx?lang=eng#a4\\_1](https://www.international.gc.ca/transparency-transparence/international-assistance-report-rapport-aide-internationale/2019-2020.aspx?lang=eng#a4_1).
- Global Affairs Canada (2021) *Statistical Report on International Assistance, 2019-2020*, Global Affairs Canada. Ottawa. Available at: <http://www.international.gc.ca/development-developpement/assets/pdfs/2014-15StatisticalReport-eng.pdf>.
- Government of Canada (2012) *Canada's Engagement in Afghanistan: Fourteenth and Final Report to Parliament*. Available at: [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/r06\\_12-eng.pdf](https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/r06_12-eng.pdf).
- HeForShe (2016) *Canadian Prime Minister Justin Trudeau Is Appointed HeForShe Champion For Youth Engagement*, HeForShe. Available at: <https://www.heforshe.org/en/canadian-prime-minister-justin-trudeau-appointed-heforshe-champion-youth-engagement> (Accessed: 2 December 2022).
- Kirkup, K. (2018) *Canadian Human Rights Act*, *The Canadian Encyclopedia*. Available at: <https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/canadian-human-rights-act> (Accessed: 23 August 2022).
- Maizland, L. (2021) *The Taliban in Afghanistan*, *Council on Foreign Relations*. Available at: <https://www.cfr.org/backgrounder/taliban-afghanistan> (Accessed: 7 May 2021).
- Murphy, J. (2015) *Trudeau Gives Canada First Cabinet with Equal Number of Men and Women*, *The Guardian*. Available at: <https://www.theguardian.com/world/2015/nov/04/canada-cabinet-gender-diversity-justin-trudeau> (Accessed: 22 February 2022).
- Nehan, N. and Cox, M. (2022) 'The Rise and Fall of Women Rights in Afghanistan', *LSE Public Policy Review*, 2(3), pp. 1–10. doi: 10.31389/lseppr.59.
- Rosyidin, M. (2020) *Teori Hubungan Internasional: Dari Perspektif Klasik Sampai Non-Barat*. 1st edn. Edited by Y. S. Hayati. Depok: Rajawali Pers.
- Tiessen, R. (2015) 'Gender Essentialism in Canadian Foreign Aid Commitments to Women, Peace, and Security', *International Journal*, 70(1), pp. 84–100. doi: 10.1177/0020702014564799.
- Tong, R. (2009) *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction*. Third Edit. North Carolina: Westview Press.

- Trudeau, J. (2017) *Why I'm Raising My Kids to be Feminists*, *Marie Claire*. Available at: <https://www.marieclaire.com/politics/a12811748/justin-trudeau-raising-kids-feminist/> (Accessed: 3 June 2022).
- UN Women (no date) *Asia and the Pacific*. Available at: <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/afghanistan/about-us> (Accessed: 20 May 2021).
- UN Women (2016) *Justin Trudeau tells the world why 'I'm a feminist'*, *Youtube*. Available at: [https://www.youtube.com/watch?v=\\_G9jgYBN5Zs](https://www.youtube.com/watch?v=_G9jgYBN5Zs) (Accessed: 26 February 2022).
- UNHCR (no date) *Gender-based Violence*. Available at: <https://www.unhcr.org/asia/gender-based-violence.html> (Accessed: 16 April 2021).
- Woetzel, J. *et al.* (2015) 'The Power of Parity: How Advancing Women's Equality Can Add \$12 Trillion to Global Growth', *McKinsey Global Institute*, (September), pp. 1–155. Available at: [www.mckinsey.com/mgi/%0Awww.mckinsey.com/mgi/%0Ahttp://www.mckinsey.com/insights/growth/how\\_advancing\\_womens\\_equality\\_can\\_add\\_12\\_trillion\\_to\\_global\\_growth](http://www.mckinsey.com/mgi/%0Awww.mckinsey.com/mgi/%0Ahttp://www.mckinsey.com/insights/growth/how_advancing_womens_equality_can_add_12_trillion_to_global_growth).
- Wollstonecraft, M. (1975) *A Vindication of the Rights of Woman*. Carol H. P. New York: W. W. Norton.
- World Bank (2021) *Poverty*, *World Bank*. Available at: <https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview#1> (Accessed: 22 March 2022).
- Wulandari, P. V. (2020) 'Peran United Nations Entity on Gender Equality and the Empowerment of Women (UN Women) dalam Kebijakan Luar Negeri Berbasis Gender Kanada (2015-2019)'. Available at: [https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1108/TA\\_PUTRI\\_VANNISA\\_FIX-ttd.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://library.universitaspertamina.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/1108/TA_PUTRI_VANNISA_FIX-ttd.pdf?sequence=1&isAllowed=y).